

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa memainkan peran penting dalam pembangunan karena saat ini desa merupakan fondasi utama dalam mencapai kemandirian suatu daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang dihormati dan diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pembangunan desa merupakan salah satu fokus utama pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah. Sebagai unit pemerintahan terkecil, desa memiliki potensi sumber daya alam dan manusia yang besar, meskipun pemanfaatannya belum optimal. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat desa merupakan langkah penting agar potensi tersebut dapat dikelola secara mandiri dan berkelanjutan.

Salah satu strategi yang dilakukan pemerintah untuk dapat meningkatkan Salah satu strategi yang dilakukan pemerintah untuk dapat meningkatkan perekonomian desa adalah dengan meningkatkan perekonomian desa dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pendirian BUMDes ini kemudian diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa pemerintah desa dianjurkan untuk memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berguna untuk mengatur perekonomian dan menggali potensi desa. BUMDes merupakan salah satu lembaga yang di dalamnya terdapat interaksi ekonomi antara pemerintah desa dengan masyarakat desa, sehingga hal ini juga berdampak pada hubungan antara pemerintah desa dengan masyarakat yang akan tercipta secara alamiah (Engkus et al., 2021)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan entitas ekonomi yang dibentuk pemerintah dengan tujuan memperkuat perekonomian masyarakat desa sekaligus mendorong kemandirian desa sesuai dengan potensi, peluang, dan kebutuhan yang dimilikinya. Hal ini diatur dalam tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pembubaran BUMDes, yang menyatakan bahwa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 4 Tahun



1 desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes sepenuhnya berada di tangan masyarakat desa, dengan i, oleh desa, dan untuk desa. Kehadiran lembaga ekonomi ini ru mendorong terciptanya kemakmuran serta meningkatkan arga desa. (Jaryono & Tohir, 2019). Pembentukan BUMDes bagi pemerintah desa merupakan salah satu langkah dalam ayaan masyarakat, yang bertujuan agar potensi dan sumber

daya yang dimiliki suatu wilayah dapat dikelola secara optimal. Mengoptimalkan potensi lokal serta memanfaatkan aset desa akan memberikan nilai tambah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Apabila potensi tersebut tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah maupun masyarakat, maka kekayaan sumber daya yang ada tidak akan memberikan hasil maksimal. Oleh karena itu, BUMDes hadir sebagai penggerak utama ekonomi lokal yang berperan penting dalam mengelola potensi desa, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan masyarakat (Bahri, 2024).

Tujuan pembentukan BUMDes sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Bab II Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang BUMDes di Kabupaten Takalar adalah: (1) meningkatkan perekonomian desa, (2) mengembangkan rencana kerja sama usaha antara desa atau dengan pihak ketiga, (3) menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan publik warga, (4) menciptakan peluang kerja, (5) meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan layanan publik, pertumbuhan ekonomi, dan keadilan di desa-desa, (6) meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa. Setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, BUMDes, sebagai badan hukum, bertindak sebagai pengumpul produk, inkubator kewirausahaan masyarakat, dan produsen kebutuhan pokok, sehingga BUMDes perlu memiliki tata kelola kelembagaan yang optimal.

BUMDes sebagai Badan Usaha Milik Desa, memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan berbagai program pengembangan yang terarah dan terpadu. Program-program yang dijalankan tidak semata-mata berfokus pada keuntungan, melainkan juga diarahkan pada pemberdayaan masyarakat serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan pengembangan potensi lokal. Melalui inisiatif-inisiatif yang beragam, mulai dari pengembangan usaha mikro dan kecil, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, hingga penyediaan layanan publik yang dibutuhkan masyarakat, BUMDes memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka peluang kerja, serta membantu mengurangi tingkat kemiskinan.

Dalam pengelolaan BUMDes, penting untuk merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 yang memberikan landasan hukum terkait pendirian, pengelolaan, dan pengembangan BUMDes. Peraturan ini mengatur struktur organisasi BUMDes, termasuk peran Musyawarah Desa, Penasihat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas, serta memberikan pedoman mengenai pengelolaan keuangan, kerjasama, dan pengawasan BUMDes. BUMDes juga



memperkuat kelembagaan desa, menciptakan kemandirian, meningkatkan pendapatan desa. BUMDes yang dikelola secara bertanggung jawab dapat menjadi instrumen kunci dalam pemerintahan desa yang berorientasi pada yang baik. Selain itu, BUMDes mendorong inovasi di desa dengan produk dan layanan baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, memanfaatkan potensi lokal. Terakhir, BUMDes mengurangi

ketergantungan desa terhadap pihak luar, baik dari sisi keuangan maupun sumber daya, sehingga memperkuat posisi tawar desa dan meningkatkan kemandirian desa dalam menghadapi tantangan pembangunan. Dengan demikian, BUMDes menjadi pilar penting bagi desa yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing.

Sebagai sebuah entitas bisnis yang berakar di tingkat desa, BUMDes memiliki fleksibilitas dan kedekatan dengan masyarakat yang memungkinkan adaptasi cepat terhadap kebutuhan dan potensi lokal. Hal ini menjadi keunggulan kompetitif BUMDes dalam mengembangkan usaha-usaha yang relevan dan berkelanjutan. Lebih dari sekadar keuntungan finansial, BUMDes juga berperan sebagai agen perubahan sosial, mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program pelatihan dan pendampingan, serta memperkuat kohesi sosial dan gotong royong sebagai modal dasar pembangunan desa. Dengan demikian, BUMDes bukan hanya sekedar penggerak utama ekonomi desa, melainkan juga pilar penting dalam membangun kemandirian dan kesejahteraan masyarakat secara holistik dan berkelanjutan.

Dalam rangka mencapai tujuan ideal tersebut, BUMDes menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari keterbatasan modal, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dan persaingan dengan pelaku ekonomi lainnya. Namun, tantangan-tantangan tersebut juga menjadi peluang bagi BUMDes untuk berinovasi, mencari solusi kreatif dan menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak. Dengan dukungan yang tepat dari pemerintah, masyarakat dan sektor swasta, BUMDes dapat menjadi kekuatan ekonomi yang signifikan di desa-desa, membantu meningkatkan pendapatan per kapita, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Pada akhirnya, keberhasilan BUMDes akan menjadi cerminan keberhasilan pembangunan ekonomi dari bawah ke atas, yang akan berdampak positif pada pembangunan ekonomi nasional secara keseluruhan.

BUMDes didirikan dengan tujuan utama memaksimalkan serta memanfaatkan potensi desa sesuai dengan peluang dan kebutuhan masyarakat. Upaya ini diwujudkan melalui peran BUMDes sebagai motor penggerak ekonomi desa, peningkatan pendapatan asli desa (PADes), pengembangan potensi lokal, pemberdayaan masyarakat, pengurangan ketergantungan pada pihak eksternal, serta penguatan kelembagaan desa. (Kamaroesid, 2016). BUMDes berperan tidak hanya dalam fungsi komersial,



tetapi juga sebagai penyedia layanan di bidang jasa serta pengembang usaha. Kehadirannya diharapkan dapat mengelola dan memanfaatkan potensi desa untuk mendukung, memfasilitasi, serta memperkuat aktivitas ekonomi desa yang dikembangkan sesuai dengan budaya setempat.

Kapasitas BUMDes sangat bergantung pada kapasitas organisasi. Dinas Sosial PMD berperan penting sebagai fasilitator. Kapasitas organisasi ini mencakup beberapa aspek penting, mulai dari kualitas dan komitmen sumber daya manusia,

kejelasan dan efisiensi struktur organisasi, efektivitas sistem manajemen keuangan dan operasional, hingga cakupan dan keberlanjutan jaringan kerja sama. Dinas Sosial PMD berperan penting dalam meningkatkan kapasitas ini melalui fasilitasi pendirian BUMDes, pendampingan dan pembinaan dalam berbagai aspek pengelolaan, pemantauan kegiatan BUMDes, dan mediasi antara BUMDes dengan pihak lain. Dengan kapasitas organisasi yang kuat dan dukungan dari Dinas Sosial PMD, BUMDes dapat menjadi penggerak ekonomi di tingkat desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi kemiskinan.

Kapasitas organisasi merujuk pada kemampuan suatu entitas untuk melaksanakan fungsi dan mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Konsep ini melibatkan berbagai dimensi, termasuk sumber daya manusia, struktur organisasi, dan sistem informasi. Douglas (2003), menjelaskan bahwa kapasitas organisasi merupakan kemampuan internal organisasi dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya secara efektif guna mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Singkatnya, kapasitas organisasi mencakup seberapa baik organisasi dapat memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia untuk mendukung operasional dan pencapaian hasil yang diinginkan.

Pada dasarnya, kapasitas organisasi pemerintah mencakup tiga aspek utama yang menjadi fokus, yakni sumber daya manusia (SDM), tata kelola atau sistem, serta organisasi sebagai wadah. Ketiga aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang perlu dikelola secara terpadu agar kinerja organisasi dapat meningkat secara optimal (Parjaman & Enas, 2021). Penguatan kapasitas organisasi menjadi hal yang penting, sebab setiap organisasi dituntut untuk mampu bersaing serta menjaga keberadaannya di tengah persaingan dengan organisasi lain.

BUMDes dalam pengelolaannya, sangat bergantung pada kapasitas organisasi. Hal ini tampak, misalnya, dalam pengembangan unit usaha, di mana kapasitas organisasi berperan pada aspek pengorganisasian dan pembagian tugas, serta dalam pengelolaan program dan pembangunan jaringan kerja agar proses produksi hingga pemasaran produk dapat berjalan lebih efektif dan efisien (Haryono, 2023). Pengembangan kapasitas organisasi BUMDes juga melibatkan peningkatan kemampuan adaptasi dan inovasi.

Dalam era perubahan yang dinamis, BUMDes dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan pasar, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Dinas Sosial PMD dapat memfasilitasi proses ini melalui pelatihan dan perubahan, pengembangan produk baru, dan pemanfaatan teknologi. Selain itu, Dinas Sosial PMD juga berperan dalam membina BUMDes agar dapat menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, seperti perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan perusahaan swasta, untuk meningkatkan akses ke pengetahuan, teknologi, dan sumber daya lainnya yang dapat mendukung pengembangan usaha. Dengan demikian, BUMDes tidak



hanya menjadi entitas bisnis yang berorientasi pada keuntungan, tetapi juga menjadi pusat inovasi dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa.

Pengembangan kapasitas organisasi BUMDes adalah sebuah investasi jangka panjang yang memerlukan komitmen serta dukungan dari beragam pihak. Pemerintah daerah, melalui Dinas Sosial PMD, memiliki peran sentral dalam menyediakan kerangka kebijakan, anggaran, dan pendampingan teknis yang dibutuhkan. Masyarakat desa juga memiliki peran penting dalam berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan BUMDes. Sektor swasta juga dapat berkontribusi melalui kemitraan bisnis, investasi, dan alih teknologi. Dengan sinergi dan kolaborasi dari berbagai pihak, BUMDes dapat menjadi kekuatan ekonomi yang signifikan di tingkat desa, mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat, serta berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional secara keseluruhan.

Dalam realitasnya, upaya peningkatan kapasitas organisasi seringkali mengalami berbagai tantangan khususnya terkait sumber daya manusia, seperti tenaga ahli atau pengawas yang terlatih, dapat menghambat kemampuan organisasi untuk melaksanakan tugas dengan baik. Struktur organisasi yang tidak memadai atau tidak jelas dapat mengakibatkan kurangnya koordinasi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas. Sementara itu, sistem informasi yang buruk atau tidak terintegrasi dapat mengurangi transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan informasi (BPK, 2023, hlm. 45). Masalah tersebut seringkali terkait satu sama lain dan berdampak signifikan pada kinerja organisasi secara umum.

Upaya pembangunan dan pengembangan potensi desa di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, semakin digencarkan melalui BUMDes setelah ditetapkannya Perda Nomor 05 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan landasan hukum bagi pembentukan, pengelolaan, dan pengembangan BUMDes di wilayah Kabupaten Takalar, mencakup mekanisme pendirian, struktur organisasi dan tata kerja, pengelolaan keuangan, operasional, dan SDM, kerjasama dengan pihak ketiga, serta pembubaran BUMDes, dengan menekankan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, dan berkelanjutan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Kabupaten Takalar, sebagai salah satu daerah di Sulawesi Selatan, memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang besar. Namun, potensi ini belum termanfaatkan optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes, yang diharapkan menjadi penggerak ekonomi desa, nyatanya masih menghadapi banyak kendala dalam



Beberapa kendala umum yang sering dihadapi BUMDes di , termasuk mungkin di Takalar, antara lain keterbatasan modal, yang kompeten, lemahnya tata kelola, kurangnya jaringan s pasar terbatas, dan kurangnya dukungan pemerintah.

rkankan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ten Takalar, yang disampaikan oleh Kepala Bidang Masyarakat, Bapak Andi Ato Alwi, dari total 76 BUMDes yang

terdaftar, 23 di antaranya dinyatakan tidak aktif. Jumlah ini mengindikasikan bahwa sekitar 30,26% BUMDes di Takalar tidak beroperasi sebagaimana mestinya. Ketidakefektifan ini ditandai dengan tidak adanya kegiatan usaha yang berjalan, tidak adanya laporan periodik kepada penasehat dan pengawas, serta mandeknya unit usaha simpan pinjam yang menjadi andalan sebagian besar BUMDes. Kondisi ini mengisyaratkan adanya permasalahan mendasar dalam pengelolaan BUMDes yang perlu diidentifikasi dan diatasi agar BUMDes dapat berfungsi sebagai penggerak ekonomi desa sesuai dengan tujuan BUMDes di Kabupaten Takalar diharapkan menjadi penggerak ekonomi desa, namun faktanya banyak yang ada beberapa tidak aktif berbagai kendala, faktor seperti keterbatasan modal dan SDM, lemahnya tata kelola, kurangnya jaringan kerjasama, serta akses pasar yang terbatas pembentukannya (Sumber: Tribun-timur.com, 14 Februari 2025).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada senin 28 Juli 2025 dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Bapak Andi Ato Alwi, terungkap bahwa telah dilakukan sebuah inisiatif penting berupa revitalisasi komprehensif terhadap seluruh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Takalar. Revitalisasi ini memastikan bahwa seluruh BUMDes di wilayah tersebut kini memiliki status aktif.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kapasitas organisasi Dinas Sosial PMD dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Takalar. Kapasitas organisasi merupakan faktor penting dalam keberhasilan pengelolaan BUMDes, karena Dinas Sosial PMD memiliki peran strategis dalam pembinaan dan pengawasan BUMDes. Penelitian ini akan menggunakan teori kapasitas organisasi yang dikemukakan oleh Douglas (2003), yang mencakup dua dimensi utama: sumber daya dan manajemen. Dimensi sumber daya akan mengkaji ketersediaan dan kualitas sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Sosial PMD, seperti sumber daya manusia (SDM), sumber daya finansial, dan sumber daya fisik. Dimensi manajemen akan mengevaluasi efektivitas sistem dan proses manajemen yang diterapkan oleh Dinas Sosial PMD dalam pengelolaan BUMDes, yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.

Adapun alasan menggunakan teori Douglas (2003) dalam penelitian ini karena teori Douglas (2003) yang membahas mengenai kapasitas organisasi sangat relevan untuk digunakan terutama yang berfokus pada kapasitas organisasi. Douglas (2003) menawarkan kerangka kerja yang komprehensif dan



memahami dan menganalisis kapasitas organisasi. Rumusan disusun berdasarkan teori kapasitas Douglas (2003) dalam as organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan n Takalar dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

:

lah:

1. Bagaimana kapasitas organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar ditinjau dari aspek Sumber Daya Manusia (SDM), Infrastruktur, Teknologi dan Keuangan, Kepemimpinan Strategis, Manajemen Program dan Proses, serta Jejaring dan Hubungan Eksternal dalam mendukung pengelolaan BUMDes?

1.2 Tinjauan Teori

a. Kapasitas Organisasi

Secara umum, kapasitas dapat dimaknai sebagai suatu kemampuan atau kekuatan. Kapasitas mencerminkan kemampuan individu, kelompok, organisasi, maupun masyarakat dalam menjalankan fungsi untuk memecahkan masalah, sekaligus menetapkan serta mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Dengan demikian, kapasitas menjadi faktor penting yang menentukan efektivitas dan keberhasilan suatu organisasi atau masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan (UNDP, 2004).

Kapasitas dapat dimaknai sebagai gabungan dari kemampuan, keterampilan, pengetahuan, sikap, nilai, relasi, perilaku, serta motivasi sumber daya manusia, termasuk kondisi yang mendukung individu, organisasi, jaringan, maupun sistem secara lebih luas dalam melaksanakan fungsi dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dari waktu ke waktu (Morgan dan Milean (2006).

Beberapa penelitian telah memberikan definisi mengenai kapasitas organisasi. Bryan (2011), dalam disertasinya *Exploring the Dimensions of Organizational Capacity for Local Social Service Delivery Organizations Using a Multi-Method Approach*, mengutip beberapa pandangan ahli terkait konsep tersebut. Yu-Lee (2002) memaknainya sebagai kemampuan untuk bekerja, sementara Gargan (1980) mendefinisikan kapasitas sebagai kemampuan organisasi dalam melaksanakan apa yang ingin dicapai. Di sisi lain, Eisinger (2002) menekankan bahwa kapasitas organisasi merupakan himpunan atribut yang digunakan untuk mencapai tujuan. Dari berbagai perbedaan pandangan tersebut, Bryan (2011) kemudian mengelompokkan kapasitas organisasi ke dalam tiga perspektif, yakni sumber daya, kapabilitas, dan kompetensi.

1. Sumber daya

Kapasitas dipahami sebagai input dalam proses produksi organisasi yang menjadi dasar bagi organisasi untuk menjalankan fungsinya. Sumber daya ini dapat berupa hal yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh dari lingkungan seperti tenaga manusia, n, kemampuan teknis, maupun pengetahuan.

s

dilihat sebagai kemampuan organisasi dalam memanfaatkan nggerakkan sumber daya dengan cara tertentu sehingga n kemampuan baru. Kapabilitas ini berlandaskan pada



“pengetahuan dan cara” dalam menggunakan sumber daya serta mentransformasikannya menjadi output.

3. Kompetensi

Kapasitas dipahami sebagai kombinasi sumber daya dan kemampuan yang berhubungan dengan efektivitas organisasi. Output yang dihasilkan didasarkan pada pemahaman atas kapasitas yang dimiliki. Asumsinya, organisasi dapat mengakses kapasitasnya dengan melihat secara positif apa yang dimiliki, yang pada akhirnya berdampak pada kinerja. Selain itu, kompetensi juga berkaitan dengan kemampuan organisasi dalam mengelola kapasitas tersebut.

Kapasitas organisasi merujuk pada kemampuan suatu entitas untuk melaksanakan fungsi dan mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Konsep ini melibatkan berbagai dimensi, termasuk sumber daya manusia, struktur organisasi, dan sistem informasi. (Douglas, 2003). Douglas menjelaskan bahwa kapasitas organisasi merupakan kemampuan internal suatu organisasi dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya secara maksimal guna mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sederhanya, kapasitas organisasi mencakup seberapa baik organisasi dapat memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia untuk mendukung operasional dan pencapaian hasil yang diinginkan.

kapasitas organisasi, sebagaimana didefinisikan oleh Horton et al. (2003), merupakan kemampuan esensial bagi suatu entitas untuk mencapai target yang lebih baik, yang terbagi ke dalam dua komponen utama: sumber daya dan manajemen. Kapasitas ini mencakup lima aspek krusial yaitu: 1. Sumber daya manusia (SDM), 2. Infrastruktur, teknologi dan sumber daya keuangan, 3. Kepemimpinan strategi, 4. Program dan proses manajemen dan 5. Jejaring dan kerjasama. Kelima aspek ini, ketika dikelola secara efektif, memungkinkan organisasi untuk mengoptimalkan potensi mereka, meningkatkan efisiensi, dan mencapai tujuan strategis mereka dalam lingkungan yang dinamis.

Kapasitas organisasi, sebagaimana dikonseptualisasikan oleh Christensen dan Gazley (2008), dipahami sebagai fungsi integral dari infrastruktur organisasi, sumber daya manusia yang kompeten, pengelolaan sumber daya keuangan dan sistem manajemen yang efektif, serta responsivitas terhadap karakteristik politik dan dinamika permintaan pasar yang membentuk lingkungan eksternal. Kerangka kerja ini menawarkan sintesis operasional yang memungkinkan analisis mendalam terhadap



bel yang mempengaruhi pengembangan kapasitas organisasi, berkaitan pada interaksi kompleks antara elemen internal dan yang menentukan kemampuan organisasi untuk beradaptasi dan tujuan strategisnya.

konsep kapasitas organisasi diadopsi dari rumusan Morgan yang Milen (2006:14) mendefinisikan kapasitas sebagai sebuah multidimensional yang mencakup kemampuan, keterampilan,

pengetahuan, sikap, nilai, relasi, perilaku, motivasi, sumber daya, serta kondisi yang mendukung individu, organisasi, jaringan/sektor, maupun sistem yang lebih luas dalam menjalankan fungsinya dan mewujudkan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Definisi ini menegaskan bahwa kapasitas tidak hanya berkaitan dengan aspek material, tetapi juga mencakup aspek non-material yang penting, serta berlaku pada berbagai level mulai dari individu hingga sistem yang kompleks dengan orientasi akhir untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

b. Pengelolaan BUMDes

Pengelolaan BUMDes tidak hanya berfungsi sebagai wadah aktivitas ekonomi desa, tetapi juga merupakan wujud nyata dari penerapan pendekatan pemberdayaan masyarakat (Agustin & Mustoffa, 2023). Secara umum, pengelolaan BUMDes mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengendalian berbagai kegiatan usaha desa agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Dalam praktiknya, pengelolaan BUMDes berlandaskan pada sejumlah prinsip utama, yaitu:

- 1) **Transparansi:** Semua kegiatan BUMDes harus dilaksanakan secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat.
- 2) **Akuntabilitas:** Setiap tindakan dan keputusan pengelola BUMDes harus dapat dipertanggungjawabkan.
- 3) **Partisipasi:** Masyarakat perlu dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan BUMDes.
- 4) **Efisiensi:** BUMDes harus dikelola secara efisien untuk mencapai tujuan dengan sumber daya yang minimal.
- 5) **Efektivitas:** seluruh kegiatan BUMDes harus diarahkan secara tepat guna mencapai tujuan yang ditargetkan.

c. Peran Dinas Sosial PMD dalam Pengelolaan BUMDes

Peran Dinas Sosial PMD Kabupaten Takalar dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui program BUMDes mengacu pada pendapat Ismawan dalam Priyono & Pranaka (1996), yang meliputi pengembangan sumber daya manusia, penguatan kelembagaan kelompok, pemupukan modal masyarakat (swasta), pengembangan usaha produktif, serta penyediaan informasi yang relevan dan tepat guna. Adapun pembahasan dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) **Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)**



Pengembangan SDM merupakan fondasi penting dalam pemberdayaan masyarakat. Dinas Sosial PMD berperan dalam meningkatkan kualitas masyarakat melalui pelatihan dan pendidikan, pendampingan, dan peningkatan kemampuan kelembagaan kelompok masyarakat. Contohnya, pengembangan kelompok, seperti kelompok tani, nelayan, maupun kelompok usaha bersama, berfungsi sebagai wadah strategis bagi

masyarakat untuk bekerja sama serta mengembangkan usaha secara kolektif. Peran Dinas Sosial PMD dalam pengembangan kelembagaan kelompok antara lain: fasilitas pembentukan kelompok, penguatan kapasitas kelompok dan peningkatan jaringan kerjasama.

3) Pemupukan Modal Masyarakat (Swasta)

Ketersediaan dan peningkatan modal merupakan elemen utama dalam mendukung pertumbuhan usaha masyarakat. Dinas Sosial PMD berperan dalam memfasilitasi akses masyarakat terhadap sumber-sumber modal, antara lain: kredit usaha rakyat (kur), pinjaman modal usaha dan investasi.

4) Pengembangan Usaha Produktif.

Penguatan usaha produktif menjadi aspek utama dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Dinas Sosial PMD berperan dalam mendorong dan memfasilitasi pengembangan usaha-usaha produktif yang memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Beberapa kegiatan yang dilakukan Dinas Sosial PMD antara lain: identifikasi potensi usaha, pelatihan dan pendampingan dan pemberian bantuan.

5) Penyediaan Informasi Tepat Guna

Informasi menjadi salah satu unsur krusial yang dibutuhkan masyarakat untuk mendukung pengembangan usaha mereka. Dinas Sosial PMD berperan dalam menyediakan informasi yang tepat guna bagi masyarakat, antara lain: informasi pasar, informasi teknologi dan informasi kebijakan.

Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar memegang peran strategis dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sebagai lembaga yang bertanggung jawab, Dinas ini memberikan dukungan dan bimbingan kepada desa-desa dalam mengembangkan dan mengelola BUMDes secara efektif. Beberapa fungsi utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pengelolaan BUMDes meliputi penyuluhan dan pelatihan, di mana mereka memberikan pelatihan kepada pengelola BUMDes dan masyarakat desa mengenai manajemen usaha, keuangan, dan pemasaran. Selain itu, Dinas juga melakukan pendampingan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program BUMDes untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan usaha. Dinas ini juga berperan dalam memfasilitasi akses sumber daya, baik itu dana, teknologi, maupun informasi yang diperlukan untuk pengembangan BUMDes. Terakhir, mereka



monitoring dan evaluasi terhadap kinerja BUMDes serta merekomendasi perbaikan untuk meningkatkan efektivitas peranan tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Takalar berkontribusi dalam meningkatkan kapasitas BUMDes, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1.3 Penelitian Terdahulu

a. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yang relevan berperan sebagai bahan perbandingan bagi peneliti dalam menyusun karya ilmiah, karena memberikan gambaran dari sudut pandang yang berbeda pada topik serupa. Dengan banyaknya penelitian terdahulu yang membahas judul sejenis, peneliti dituntut untuk lebih cermat dalam mengidentifikasi kelemahan atau kekurangan dari hasil penelitian tersebut. Selain itu, penelitian terdahulu juga dapat menjadi sumber inspirasi dan kreativitas yang mendukung proses penelitian baru. Kehadirannya membantu peneliti dalam merancang langkah-langkah sistematis, baik dari aspek teori maupun konsep, sehingga penelitian dapat tersusun dengan lebih terarah.

Hasil penelitian sebelumnya menjadi salah satu acuan penting dalam pelaksanaan suatu penelitian. Hal ini karena penelitian terdahulu berperan dalam memperluas wawasan serta memperdalam pemahaman terhadap teori yang akan digunakan dalam kajian yang sedang dilakukan. Dari telaah penelitian sebelumnya, peneliti menemukan beberapa karya yang memiliki relevansi signifikan dengan penelitian ini. Namun demikian, meskipun terdapat kesamaan dalam topik pembahasan, penelitian ini tetap memiliki perbedaan dibandingkan penelitian terdahulu.

Sehubungan dengan penelitian yang penulis lakukan, terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang dijadikan sebagai kajian awal, khususnya studi yang relevan mengenai kapasitas organisasi. Penelitian terdahulu memberikan wawasan mendalam mengenai berbagai aspek kapasitas organisasi, termasuk sumber daya manusia, struktur organisasi, proses manajemen, dan relasi eksternal. Studi-studi ini menyoroti pentingnya kapasitas organisasi dalam mencapai tujuan, terutama dalam konteks pelayanan publik dan sektor nirlaba. Kajian ini akan membandingkan dan mengkontraskan temuan dari penelitian terdahulu dengan hipotesis penelitian penulis, untuk mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan dan memberikan kontribusi baru dalam pemahaman tentang kapasitas organisasi.



Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama/Tahun/Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1	Risky dkk, 2021, Kapasitas Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam Pelaksanaan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Bandung	Penelitian menggunakan ini metode kualitatif deskriptif	Secara umum, kapasitas organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung masih belum memadai untuk mendukung implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik. Aspek kapasitas yang belum terpenuhi mencakup Sumber Daya Manusia, keuangan, proses dan infrastruktur, serta perencanaan dan pengembangan. Sementara itu, aspek relasi dan jaringan dapat dikatakan sudah terpenuhi. Penulis menyimpulkan bahwa keterbatasan kompetensi pegawai menjadi faktor utama yang memengaruhi belum optimalnya pemenuhan kapasitas pada aspek-aspek lainnya.
2	Ningrum dkk, 2018, Kapasitas Organisasi dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Madrasah di Indonesia	Penelitian menggunakan ini metode kualitatif	Kapasitas Kementerian Agama Kabupaten Bandung dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan Madrasah Ibtidaiyah masih tergolong rendah. Hal ini sejalan dengan teori para ahli yang menyatakan bahwa kapasitas organisasi dapat dikatakan baik apabila seluruh aspeknya terpenuhi. Berdasarkan hasil analisis, kapasitas pada aspek sumber daya manusia, keuangan, infrastruktur dan teknologi informasi,



			kepemimpinan, serta hubungan dan jaringan kerja sama masih perlu ditingkatkan agar program peningkatan mutu pendidikan Madrasah Ibtidaiyah dapat berjalan optimal dan mencapai tujuan yang diharapkan.
3	Asriani, 2019, Kapasitas Organisasi Kelompok Tani Lorong Di Kecamatan Tamalate Kota Makassar (Rusli, 2019)	Penelitian menggunakan ini metode kualitatif	Kapasitas organisasi kelompok tani lorong belum terlaksana secara optimal, terlihat dari masih rendahnya pemahaman terhadap substansi program yang dijalankan. Dari sisi pengembangan sumber daya manusia, pelaksanaannya belum maksimal, begitu pula pada aspek penguatan organisasi yang belum menunjukkan hasil optimal. Kondisi ini menyebabkan kapasitas organisasi kelompok tani lorong belum berjalan secara efektif dan efisien.

Dari tiga penelitian sebelumnya yang relevan, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini, baik dalam hal teori yang digunakan, tujuan yang ingin dicapai, maupun teknik pengumpulan data yang diterapkan pada masing-masing penelitian:

Penelitian pada jurnal Risky dkk, 2021. Jurnal ini membahas bagaimana kapasitas organisasi mempengaruhi mutu pendidikan di madrasah. Fokusnya pada sumber daya organisasi, termasuk SDM, dan bagaimana hal itu berdampak pada kualitas pendidikan. Jurnal ini menyoroti pentingnya kapasitas dalam mencapai tujuan organisasi, khususnya dalam



Penelitian pada jurnal Ningrum dkk, 2018. Jurnal ini membahas kapasitas organisasi mempengaruhi mutu pendidikan di fokusnya pada sumber daya organisasi, termasuk SDM, dan al itu berdampak pada kualitas pendidikan. Jurnal ini menyoroti

pentingnya kapasitas dalam mencapai tujuan organisasi, khususnya dalam sektor pendidikan.

Penelitian pada jurnal Asriani, 2019. Jurnal ini meneliti kapasitas organisasi dalam konteks kelompok tani lokal. Fokusnya pada bagaimana faktor-faktor seperti struktur organisasi, sumber daya, dan kepemimpinan mempengaruhi efektivitas kelompok tani. Menekankan pentingnya kapasitas organisasi dalam pemberdayaan masyarakat di sektor pertanian.

Persamaan utama dari Jurnal-jurnal tersebut:

1. Fokus pada Sumber Daya: Semua jurnal menekankan pentingnya sumber daya, terutama SDM, dalam menentukan kapasitas organisasi.
2. Relevansi dengan Pengelolaan: Masing-masing jurnal menunjukkan bagaimana kapasitas organisasi berdampak pada efektivitas pengelolaan di berbagai sektor.
3. Pendekatan Multi-Dimensi: Jurnal-jurnal ini melihat kapasitas organisasi dari berbagai dimensi, termasuk kompetensi, struktur, dan relasi.

Perbedaan utama dari Jurnal-jurnal tersebut terdapat pada konteks penelitian. Jurnal-jurnal tersebut mencakup berbagai konteks, termasuk:

- a. Kebijakan lingkungan
- b. Mutu pendidikan
- c. Kelompok tani lokal

Berikut merupakan landasan teori mengenai kapasitas organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Takalar:

1.4 Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran berfungsi sebagai pijakan utama dalam mengembangkan berbagai konsep dan teori yang mendukung suatu penelitian. Kerangka ini harus berlandaskan penggunaan pada teori tertentu yang tidak hanya menjadi dasar, tetapi juga alat yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian.

Dalam teori Douglas 2003 dalam *Evaluating Capacity Development* mengidentifikasi indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kapasitas organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) dalam pengelolaan BUMDes di Kabupaten Takalar.

Douglas dalam *Evaluating Capacity Development* menekankan bahwa kapasitas organisasi merupakan kemampuan internal organisasi dalam memanfaatkan sumber daya secara optimal guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sederhananya, kapasitas organisasi mencakup seberapa baik

memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia untuk asional dan pencapaian hasil yang diinginkan.

yang dapat digunakan untuk mengukur kapasitas organisasi nberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) dalam pengelolaan arkan teori kapasitas organisasi yang dikemukakan oleh yang mencakup dua dimensi utama: Sumber daya dan

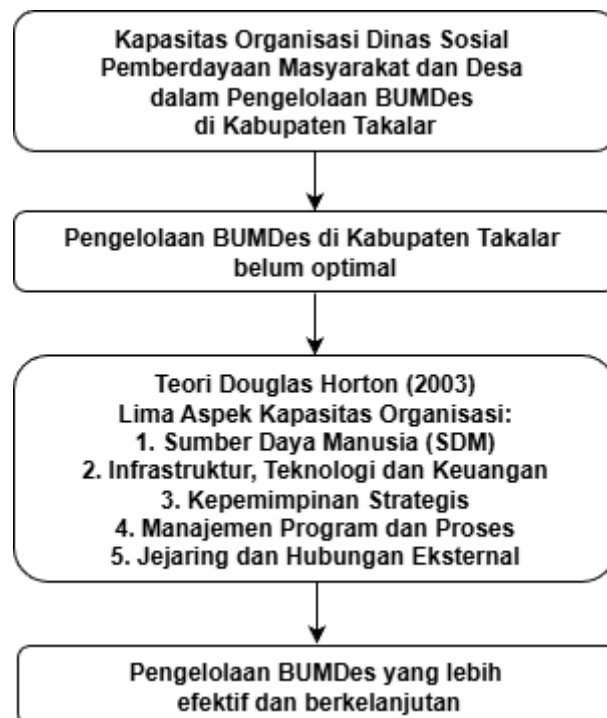


Sumber daya mencakup aspek-aspek yang secara tradisional dianggap sebagai kapasitas “keras”, seperti infrastruktur, teknologi, keuangan, dan tenaga kerja. Dalam konteks organisasi, sumber daya tersebut meliputi personel, sarana, kendaraan, peralatan, serta pendanaan yang dimiliki..

Manajemen berhubungan dengan upaya menciptakan kondisi agar tujuan yang tepat dapat ditetapkan sekaligus dicapai. Aktivitas manajerial mencakup perencanaan tujuan, pembagian tanggung jawab, kepemimpinan, pengalokasian sumber daya, pemberian motivasi dan pengawasan terhadap staf, serta membangun hubungan dengan para pemangku kepentingan. Seluruh kegiatan tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama, yaitu kepemimpinan strategis, manajemen program dan proses, serta pembangunan jaringan dan relasi.

Adapun Kerangka pemikiran yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1 Kerangka Pikir



1.5 Tujuan dan Manfaat

a. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah menganalisis kapasitas organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pengelolaan BUMDes di Kabupaten Takalar dengan menggunakan teori kapasitas organisasi menurut Doulas (2003) dengan duan indikator yaitu sumber daya dan manajemen;

1. Untuk mengetahui kapasitas organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar ditinjau dari aspek Sumber Daya Manusia (SDM), Infrastruktur, Teknologi dan Keuangan, Kepemimpinan Strategis, Manajemen Program dan Proses, serta Jejaring dan Hubungan Eksternal dalam mendukung pengelolaan BUMDes.

b. Manfaat Penelitian

1. Bagi Dinas Sosial PMD Kabupaten Takalar: Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi serta rekomendasi bagi Dinas Sosial PMD dalam upaya meningkatkan kapasitas organisasi mereka dalam pengelolaan BUMDes.
2. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar: Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan BUMDes.
3. Bagi Pengelola BUMDes: Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman mengenai pentingnya kapasitas organisasi Dinas Sosial PMD dalam mendukung keberhasilan pengelolaan BUMDes.
4. Bagi Masyarakat Desa: Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat melalui peningkatan kinerja BUMDes yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
5. Bagi Peneliti Lain: Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan serta dasar bagi penelitian selanjutnya yang menyoroti topik kapasitas organisasi.



BAB II

METODE PENELITIAN

1.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif sebagai teknik pengumpulan data. Creswell (2014) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan pendekatan ilmiah yang bertujuan memahami permasalahan manusia dalam konteks sosial dengan menyajikan gambaran yang menyeluruh dan kompleks, serta melaporkan perspektif mendalam dari beragam sumber informasi. Dalam penelitian ini diterapkan strategi kualitatif deskriptif. Tujuannya adalah memperoleh data yang bersumber dari apa yang dilihat, diucapkan, dirasakan, dan dilakukan oleh informan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan (Lestari et al., 2022 dalam Fahrudin, 2023)

1.2 Desain Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai kapasitas organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Takalar. Data akan dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan berbagai aktor yang terlibat, termasuk kepala Dinas Sosial PMD, staf terkait, pengelola BUMDes, pemerintah desa, dan tokoh masyarakat. Observasi partisipatif juga akan dilakukan untuk mengamati aktivitas dan interaksi di Dinas Sosial PMD terkait pengelolaan BUMDes. Selain itu, studi dokumentasi akan melengkapi data dengan menganalisis laporan keuangan, rencana kerja, dan dokumen terkait lainnya. Analisis konten akan digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema penting dari data yang terkumpul, yang kemudian akan diinterpretasikan untuk memahami kapasitas organisasi Dinas Sosial PMD dari perspektif para aktor yang terlibat. Penelitian ini diharapkan mampu menyajikan gambaran yang komprehensif dan mendalam mengenai kapasitas organisasi Dinas Sosial PMD, sekaligus memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kapasitas organisasi dalam pengelolaan BUMDes agar lebih efektif dan berkelanjutan.

1.3 Prosedur Penelitian

a. Penentuan Informan

Informan adalah individu yang memberikan informasi terkait kondisi dan situasi latar penelitian. Sebelum menentukan siapa yang menjadi informan, peneliti terlebih dahulu menetapkan situasi sosial penelitian, yakni apakah permasalahan benar-benar terjadi.



Tabel 1.2. Partisipan penelitian

No	Partisipan	Peran dan Tanggung Jawab
1	Drs. Safaruddin, M.AP	Sekretaris Dinas Sosial PMD
2	Andi Ato Alwi, SE., M.Si	Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat Desa (PMD)
3	Resky Indirasyari	PSM Ahli Muda
4	Rusdy Harsyam	Penelaah Tehnis Kebijakan
5	Fatmawati, SE	Staf Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
6	Wardah	Staf Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
7	Yuliana S	Staf Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
8	Samineni	Staf Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
9	St Junha	Staf Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
10	Abdul Asis, S.Sos., M.Si	Kepala Desa Tamasaju
11	Fadila Wulandari	Sekretaris BUMDes Minasa Tamasaju
12	Husam, SE	Kepala Desa Tamalate
13	Sumawati, S.Ag	Direktur BUMDes Baji Pa'mai

b. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahap yang sangat krusial dalam metode ilmiah, karena data yang diperoleh umumnya digunakan untuk kepentingan analisis penelitian, termasuk juga dalam penelitian verifikatif guna menguji suatu tesis. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara, serta telaah dokumen. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan langsung adalah metode pengumpulan data dengan cara melihat secara langsung objek penelitian, mencatat peristiwa, serta menelaah dokumen secara teliti. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan mengamati dan menganalisis secara

kapasitas organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan am pengelolaan BUMDes di Kabupaten Takalar. Data hasil mencakup aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, hingga ekspresi asaan informan. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh nyata dari suatu peristiwa guna menjawab pertanyaan



2. Wawancara

Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*). Wawancara tersebut dilakukan dengan berpedoman pada panduan wawancara yang telah disusun, dengan tujuan menggali temuan empiris terkait kapasitas organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pengelolaan BUMDes di Kabupaten Takalar. Proses wawancara dan pengamatan dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada informan sesuai pedoman, tanpa menunjukkan secara langsung hal-hal yang berhubungan dengan fokus masalah penelitian. Pemilihan wawancara mendalam dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang lebih kompleks, terutama menyangkut pandangan, sikap, dan pengalaman pribadi informan. Agar tidak kehilangan data, peneliti juga meminta izin kepada informan untuk merekam percakapan menggunakan telepon seluler.

3. Telaah Dokumen

Dokumen merupakan sumber data yang diperoleh melalui kajian literatur seperti undang-undang, arsip, surat, keputusan, majalah, surat kabar, maupun foto-foto yang tersedia di lokasi penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan mencatat informasi yang sudah ada pada instansi terkait namun belum tercantum dalam pedoman wawancara. Dokumen sangatlah penting bagi penelitian dikarenakan dengan teknik ini kita bisa mendapatkan data yang kongkrit dan dapat dipercaya dengan adanya bukti dokumen. Seperti dokumen-dokumen rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, laporan evaluasi kinerja BUMDes, dan peraturan-peraturan terkait akan dipelajari untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan dan program yang berkaitan dengan pengelolaan BUMDes.

c. Teknik Analisis Data

Untuk menunjang keberhasilan penelitian diperlukan adanya teknik analisis data yang telah didapatkan sebelumnya, sehingga dapat Menyusun hasil data secara sistematis. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data



Dalam sebuah penelitian, reduksi data merupakan proses dalam bentuk mereduksi dan meningkatkan kualitas data yang akan diolah dalam sebuah penelitian. Proses ini dapat mengurangi data yang tidak relevan agar lebih mudah dalam menganalisis dan menghasilkan data yang murni dan terfokus..

Data

Reduksi data merupakan proses dari penelitian yang telah dilakukan untuk menyederhanakan proses pengumpulan data dan diolah, sehingga data yang

didapatkan yang biasanya dalam bentuk narasi, teks, diagram, tabel, bagan yang memiliki tujuan agar memperdalam pemahaman dari penelitian dari informasi dan menyajikan dalam bentuk tabel atau penjelasan.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap terakhir dari penelitian yang dimana dari semua pembahasan dan data yang telah diperoleh dengan cermat dibuatkan dalam bentuk penjelasan yang padat atau singkat untuk menguraikan semua pembahasan di dalam penelitian, Sehingga data-data yang diperoleh dapat diuji validitasnya.

d. Validitas dan Reliabilitas Data

Validitas penelitian kualitatif lebih menekankan pada kepercayaan, kejelasan, dan triangulasi. Akibatnya, metode ini mengandalkan pengamatan langsung melalui, wawancara mendalam, dan verifikasi data dari berbagai sumber untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh benar-benar mencerminkan fenomena yang diteliti (Creswell 2018). Dalam konteks penelitian tentang kapasitas organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pengelolaan BUMDes di Kabupaten Takalar, validitas diterapkan melalui beberapa cara, antara lain:

1. Validitas

a) Triangulasi

Triangulasi adalah metode pengumpulan data dengan mengombinasikan berbagai teknik dan sumber data yang tersedia. Beberapa jenis triangulasi yang digunakan meliputi triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu.

b) Member check

Member check merupakan proses pengecekan ulang data yang diperoleh dari informan atau pemberi data, yang bertujuan untuk mengetahui perbandingan data yang diterima oleh informan dan yang terjadi dilapangan. Sehingga dapat menyesuaikan data yang akan ditulis pada penelitian dari kapasitas organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pengelolaan BUMDes di Kabupaten Takalar.

2. Realibitas Data

Realibitas data merupakan salah satu metode yang dapat mengukur ketepatan data pada penelitian kualitatif, apakah telah sesuai dengan data yang didapatkan dengan permasalahan yang ada pada yang terjadi dilapangan. Reliabilitas dalam penelitian mengacu idalan metode dengan alat ukur yang digunakan sehingga data rcaya.



Tabel 1.3 Matriks Reliabilitas Data dan Pernyataan Responden

Dimensi Kapasitas Organisasi (Horton, 2003)	Informan (Nama & Jabatan)	Inti Pernyataan / Temuan Lapangan	Kesimpulan Reliabilitas
1. Sumber Daya Manusia (SDM)	1. Andi Ato Alwi, SE., M.Si (Kepala Bidang PMD)	"Jumlah tenaga kami khususnya di bidang pemberdayaan masyarakat sangat kurang, bahkan struktural yang menangani BUMDes itu kosong. Kami hanya memiliki 3 orang staf."	Reliabilitas Tinggi: Adanya krisis personil diakui oleh pimpinan teknis maupun pelaksana di desa.
	2. Drs. Safaruddin, M.AP (Sekretaris Dinas Sosial PMD)	"Mendudukan pegawai itu kewenangan Bupati, idealnya ditangani sarjana ekonomi, tapi kami menganggap keputusan pimpinan sudah tepat. Kami siasati dengan learning by doing."	
	3. Abdul Asis, S.Sos., M.Si (Kepala Desa Tamasaju)	"Tantangan di sini adalah faktor SDM pengelola yang masih kurang maksimal. Seandainya SDM cukup, otomatis akan menghasilkan pendapatan besar."	
	4. Sukmawati, S.Ag (Direktur BUMDes Tamalate)	"Kurangnya SDM untuk pengelola, staf hanya tiga orang, unit usaha budi daya ikan nila belum mulai karena kekurangan tenaga."	
	1. Andi Ato Alwi, SE., M.Si (Kepala Bidang PMD)	"Infrastruktur sangat minim, kapasitas pengelola dalam teknologi sangat terbatas. Anggaran sangat minim, hampir tidak ada anggaran khusus untuk pembinaan BUMDes."	Reliabilitas Tinggi: Konsistensi pernyataan "Nihil Anggaran" dari level pimpinan

	2. Drs. Safaruddin, M.AP (Sekretaris Dinas Sosial PMD)	<i>"Dana yang dikasih OPD itu hanya 100 juta dibagi 5 bagian. Anggaran BUMDes ada di Dana Desa (20%), jadi anggaran itu tidak bisa dikelola oleh Dinas."</i>	hingga staf pelaksana.
	3. Staf PMD (Fatmawati, Wardah, Yuliana, Samineni, St. Junha)	<i>"Tidak ada anggaran dalam pembinaan BUMDes." (Pernyataan kolektif saat wawancara staf).</i>	
3. Kepemimpinan Strategis	1. Andi Ato Alwi, SE., M.Si (Kepala Bidang Bidang PMD)	<i>"Kami terus mendorong desa untuk mengaktifkan BUMDes sebagai lembaga ekonomi strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes)."</i>	Reliabilitas Tinggi: Pimpinan menggunakan jalur formal (Tupoksi) untuk menjaga stabilitas kerja.
	2. Drs. Safaruddin, M.AP (Sekretaris Dinas Sosial PMD)	<i>"Kami melakukan pembinaan terhadap staf mengacu pada Tupoksi. Kami tidak bisa mengintervensi desa tentang penambahan struktur bila belum perlu."</i>	
4. Manajemen Program & Proses	1. Andi Ato Alwi, SE., M.Si (Kepala Bidang Bidang PMD)	<i>"Pembinaan dari sisi kelembagaannya dulu agar tertata baik, baru ke pengelolaan dan pelaporan. Kendalanya, program ada tapi kurang didukung penganggaran."</i>	Reliabilitas Tinggi: Proses kerja terfokus pada kepatuhan aturan dan pengawasan eksternal.
	2. Drs. Safaruddin, M.AP (Sekretaris Dinas Sosial PMD)	<i>"Digitalisasi wajib bagi seluruh pegawai di Takalar. Evaluasi kami diawasi oleh BPK, KPK, dan Inspektorat. Kalau ada anggaran desa yang</i>	



		<i>kurang bagus, Inspektorat pasti ke situ."</i>	
5. Jejaring & Hubungan Eksternal	1. Andi Ato Alwi, SE., M.Si (Kepala Bidang PMD)	<i>"Mitra kerja kami dari Kementerian, PMD Provinsi, dan pihak ketiga untuk peningkatan kapasitas. Kami dorong BUMDes masuk ke market place (digitalisasi)."</i>	Reliabilitas Tinggi: Adanya kejujuran informan mengenai belum adanya kerja sama perbankan.
	2. Drs. Safaruddin, M.AP (Sekretaris Dinas Sosial PMD)	<i>"Sejauh ini, terkait MoU dengan sektor swasta atau Perbankan untuk permodalan, belum ada MoU."</i>	

Berdasarkan kelima aspek tersebut, kapasitas organisasi Dinas Sosial PMD Kabupaten Takalar dalam pengelolaan BUMDes saat ini berada pada tingkat "Kapasitas Minimum". Organisasi memiliki kemauan politik (*political will*) yang kuat lewat visi digitalisasi Bupati, namun secara operasional "lumpuh" akibat ketiadaan anggaran pembinaan dan minimnya SDM ahli. Akibatnya, fungsi pembinaan hanya menyentuh aspek administratif-kelembagaan, sementara aspek pengembangan bisnis dan permodalan belum terjangkau secara optimal.

